

Elderly Participation in General Elections

Kurniati Ningsih^{1*}, Vera Agustina², Universitas Maritim Raja Ali Haji

Corresponding Author: Kurniati Ningsih ningsihkurniati787@gmail.com

ARTICLEINFO

Keywords: Participation, Elderly, General Elections

Received: 20, June Revised: 20, July Accepted: 25, August

©2023 Ningsih, Agustina: This is an open-access article distributed under the terms of the <u>Creative Commons</u> Atribusi 4.0 Internasional.



ABSTRACT

For Indonesia, which is on its way democracy, elections (general elections) are an important feature that must be held periodically at certain times. Ideally, elections can be a symbol as well as one of the benchmarks of democracy because election results reflect the participation and aspirations of the people if they are held in an atmosphere of openness with freedom of opinion and association. Keith Fauls' Theory of Political Participation in his book, political sociology: A Critical Introduction, defines political participation as "the active engagement of individuals or groups in the governance process. The research method uses a qualitative approach, a research method that is used to understand phenomena about what is experienced by research subjects such as behavior, perception, motivation, actions and others in a holistic manner and by means of descriptions in the form of words and language. This research is to find out how the form of participation of the elderly in elections is the reason researchers choose this research topic. The elderly need special attention in elections

DOI: https://doi.org/10.55927/jpmf.v2i4.5060

ISSN-E: 2829-6486

Partisipasi Lansia dalam Pemilihan Umum

Kurniati Ningsih^{1*}, Vera Agustina², Universitas Maritim Raja Ali Haji

Corresponding Author: Kurniati Ningsih ningsihkurniati787@gmail.com

ARTICLEINFO

Kata Kunci: Partisipasi, Lansia, Pemilu

Received : 20 Juni Revised : 20 Juli Accepted: 25 Agustus

©2023 Ningsih, Agustina: This is an open-access article distributed under the terms of the <u>Creative Commons Atribusi 4.0</u> Internasional.



ABSTRAK

Bagi negara Indonesia yang tengah menapaki demokrasi, pemilu (general election) merupakan ciri penting harus yang dilaksanakan secara berkala dalam waktuwaktu tertentu. Idealnya, pemilu dapat menjadi lambang sekaligus salah satu tolak ukur demokrasi dikarenakan hasil pemilu menjadi cerminan partisipasi dan aspirasi masyarakat jika diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan berserikat. Teori Partisipasi Politik Keith Fauls dalam bukunya, political sociology: A Critical Introduction, memberikan batasan partisipasi politik sebagai "keterlibatan secara aktif (the active engagement) dari individu atau kelompok ke dalam proses pemerintahan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif suatu metode penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti prilaku, presepsi, motivasi, tindakan dan lain lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata kata dan bahasa. Penelitian untuk mengetahui bagaimana bentuk partisipasi lansia dalam pemilu merupakan alasan peneliti memilih topik penelitian ini. Lansia perlu mendapat perhatian khusus dalam pemilu

PENDAHULUAN

Berbicara mengenai demokrasi di Indonesia, maka pasti akan berkaitan pemilihan umum. Salah satu indikator suksesnya suatu penyelenggaraan pemilihan umum adalah partisipasi politik masyarakat yang diwujudkan dalam hal pemberian hak suara yang dimiliki oleh masyarakat yang telah memiliki hak pilih pada pemilihan umum tersebut. Indonesia adalah yang menggunakan sistem demokrasi, yang pemerintahannya berasal dari rakyat. Pada pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dinyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan menurut Undang-undang Dasar, untuk melaksanakan kedaulatan rakyat, maka dilakukan pemilihan umum. Pemilihan umum diartikan sebagai proses pemungutan suara dimana semua warga negara mempunyai hak yang sama untuk memilih dan dipilih menjadi pemimpin.

Bagi negara Indonesia yang tengah menapaki demokrasi, pemilu (general election) merupakan ciri penting yang harus dilaksanakan secara berkala dalam waktu-waktu tertentu. Idealnya, pemilu dapat menjadi lambang sekaligus salah satu tolak ukur demokrasi dikarenakan hasil pemilu menjadi cerminan partisipasi dan aspirasi masyarakat jika diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan berserikat. Penyelenggaraan pemilu sebagai mekanisme pemilihan haruslah dilandasi semangat kedaulatan rakyat dan dilaksanakan secara demokratis. Salah satu prasyarat utama untuk mewujudkan pemilu yang demokratis adalah adanya partisipasi politik.

Partisipasi politik merupakan suatu tindakan masyarakat secara personal untuk mempengaruhi keputusan oleh pemerintah. Partisipasi yang sering terjadi di pemilihan umum memiliki berbagai sifat, ada yang bersifat individual atau bersifat kolektif. ada yang bersifat terorganisir, ada yang bersifat legal atau bersifat illegal, ada yang bersifat efektif atau bersifat tidak efektif. Partisipasi politik selalu menjadi salah satu aspek penting pada suatu demokrasi negara Indonesia. Partisipasi politik merupakan salah satu ciri khas dari modernisasi politik itu sendiri. pemerintah membuat dan melaksanakan keputusan politik yang akan menyangkut dan mempengaruhi kehidupan masyarakat, maka masyarakat mempunyai hak dalam keikutsertaan dalam penentuan isi keputusan politik yang dibuat pemerintah.

Menurut Miriam Budiardjo , partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (contacting) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, dan sebagainya.

Negara Republik Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi yang memiliki slogan "Dari Rakyat Oleh Rakyat Untuk Rakyat". Negara yang menganut sistem Demokratis memiliki kelebihan tersendiri, karena didalam setiap keputusan politik dan pengambilan kebijakan

selalu terpacu pada aspirasi masyarakat. Masyarakat adalah peran utama dalam sebuah Negara yang menganut sistem Demokrasi memiliki peran yang sangat penting bagi pemilihan umum di Indonesia, partisipasi politik masyarakat merupakan salah satu peranan masyarakat dalam sebuah demokrasi dalam perpolitikan. Masyarakat itu sendiri memepunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan eksekutif maupun legislatif baik di pemerintah pusat maupun daerah.

Pemilihan umum (general election) adalah cara yang diselenggarakan untuk memilih wakil wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan secara demokratis oleh karena itu bagi negara negara yang menyebut dirinya negara demokrasi. Demokrasi (general election) merupakan ciri penting yang harus dilaksanakan secara berkala dalam waktu tertentu.

Pemilihan umum merupakan pesta rakyat yang memungkinkan setiap individu harus berperan aktif dalam menggunakan hak haknya sebagai warga Negara. Sesuai dengan hal tersebut pelaksanaan pesta demokrasi tentunya diikuti oleh semua kalangan masyarakat, baik dari kalangan pemilih lansia yang sudah berumur 17 tahun hingga yang sudah berumur lebih maupun dari kalangan lansia. Mereka merupakan sekelompok masyarakat yang baru dapat menggunakan hak pilihnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pemilih adalah warga Negara Indonesia yang sudah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih sudah kawin atau sudah pernah kawin.Ini berarti status pemilih dalam kontek pemilihan umum (pemilu) itu pasti melibatkan setiap warga negara yang sudah memenuhi persyaratan sebagai pemilih dalam setiap pemilihan umum. Di dalam hal tersebut setiap pemilih yang sudah berusia dibawah 21 tahun dikelompokan kedalam gologan pemilih lansia yang biasa kita kenal sebagai pemilih lansia, sudah banyak yang terfokus pada pembahasan terhadap pemilih lansia, dilihat dari pejelasan dari UU tersebut, dapat kita fahami bahwa adanya pemisahan atau sorotan khusus kepada setiap pemilih yang berusia sudah 60 tahun keatas. Golongan tersebut dapat dikategorikan kedalam kategori pemilih lansia (Lanjut Usia).

Usia lanjut adalah suatu proses yang alami yang tidak dapat dihindari oleh manusia. Lansia ditandai dengan perubahan fisik, emosional, dan kehidupan seksual. Gelaja-gelaja kemunduran fisik seperti merasa cepat capek, stamina menurun, badan menjadi membongkok, kulit keriput, rambut memutih, gigi mulai rontok, fungsi pancaindra menurun, dan pengapuran pada tulang rawan (Maramis, 2016).

Menurut Bustan (dalam Maramis, 2016) perubahan mentalemosional yaitu daya ingat menurun, sering lupa, emosi berubah, sering marahmarah, rasa harga diri tinggi, dan mudah tersinggung. Selain perubahan – perubahan yang bersifat negatif diatas lansia juga mengalami perubahan yang bersifat positif seperti menurut Bastaman, lansia selalu berusaha meningkatkan iman dan takwanya kepada tuhan, lansia mampu hidup mandiri dan tidak terlalu tergantung pada keluarga. Selain itu lansia juga dapat menjalin hubungan tetap rukun dengan pasangan, anak-anak, kerabat dekatnya dan lansia memiliki teman dilingkungan untuk berkomunikasi dan bergaul.

Pemilih-pemilih lanjut usia itu merupakan mayoritas yang mempunyai ratarata usia 60 tahun atau lebih. Pada usia yang sangat rentan ini mayoritas pemilih sudah mulai berkurang ilmu pengetahuan politiknya.sehimgga Pemilih lansia adalah salah satu pemilih yang sangat cukup mendukung dalam perolehan hasil suara dalam pemilihan umum.dan merupakan karakteristik perilaku pemilih lansia yang cenderung masih labil dan apatis, pengetahuannya tentang politik masih kurang sebab pada usia para beliau yang sudah lanjut usia itu memiliki kecentdrungan serta tidak terlalu memikirkan hal-hal yang mengenai tentang pemilihan umum sebagai pemilih lansia dalam hal kontestasi politik pada pemilu. Sedangkan pada setiap pemilih lansia itu cukup mempengaruhi hasil perolehan suara pada pemilu tersebut.

Tingkat partisipasi politik pemilih lansia perlu diketahui karena pemilih lansia juga menentukan dalam pemilihan umum, tidak terkecuali dalam pemilihan walikota dan wakil walikota. Semua warga Indonesia berhak untuk ikut memilih dalam pemilihan umum dengan catatan telah memenuhi syarat pemilih dalam pemilihan umum. Turut serta dalam proses penyelenggaraan demokrasi atau pemilihan umum sangat penting karena pemimpin yang terpilih dalam pemilihan umum sangat menentukan nasib rakyat di daerah tempat terpilihnya. Hal yang tidak diinginkan pada saat diadakannya pemilihan umum adalah banyaknya masyarakat yang tidak ikut memilihn atau tidak menggunakan hak pilihnya.

Pemilu yang disebut dengan golongan putih (golput) entah karena pengaruh tingkat pengetahuan masyarakat yang rendah tentang partisipasi politik atau tidak adanya sosialisasi yang dilakukan KPU untuk menarik minat masyarakat untuk berpartisipasi dalan pemilihan umum. Tidak adanya sosialisasi dapat menjadi masalah yang menyebabkan pemilih lansia tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Hal tersebut dapat terjadi pada pemilih lansia yang seharusnya turut ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik tersebut namun terkendala banyak faktor salah satunya karena ketidaksadaran atau ketidakmampuan pemilih lansia untuk pergi ke TPS, karena kurangnya perhatian atau kurangnya pelayanan kemudahan dalam proses pemilihan terhadap pemilih lansia.

Berdasarkan apa yang telah diutaran pada uraian diatas maka sangat menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul Partisipasi Lanjut Usia dalam Pemilhan Umum.

PELAKSAAN DAN METODE

Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif suatu metode penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti prilaku, presepsi, motivasi, tindakan dan lain lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata kata dan bahasa. Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana bentuk partisipasi lansia dalam pemilu merupakan alasan peneliti memilih topik penelitian ini.

Menurut(Zuriah, 2006:47) penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan gejala, fakta, atau peristiwa yang sistematis dan akurat yang berkaitan dengan ciri-ciri populasi atau daerah tertentu. Penelitian

deskriptif tidak perlu menguji hipotesis dan menerangkan saling berhubungan. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memusatkan perhatian terhadap masalah-masalah atau fenomena- fenomena yang ada pada saat penelitian dilakukan atau masalah yang aktual kemudian menggambarkan fakta tentang masalah yang di selidiki sebagaimana adanya diiringi interprestasi.

Menurut (Bungins, 2007:68) metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu bertujuan buat mendeskripsikan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai fenomena realitas sosial yang terdapat pada masyarakat yang menjadi objek penelitian, serta berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, contoh, tanda, atau gambaran, tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelenggaraan pemilu merupakan wujud pelaksanaan sistem demokrasi tidak langsung (indirect democracy). Pada sistem demokrasi tidak langsung (indirect democracy) atau demokrasi perwakilan (representative democracy), dilaksanakannya pemilu bertujuan agar yang terpilih benar-benar bertindak atas nama rakyat sehingga pemilihannya harus dilakukan sendiri oleh rakyat melalui pemilu. Penyelenggaraan pemilu sebagai salah satu wujud mekanisme demokrasi yang haruslah dilandasi semangat kedaulatan rakyat dan dilaksanakan secara demokratis karena pemilu yang demokratis akan menguatkan demokrasi Indonesia.

Penyelenggaraan pemilu sebagai mekanisme pemilihan haruslah dilandasi semangat kedaulatan rakyat dan dilaksanakan secara demokratis. Salah satu prasyarat utama untuk mewujudkan pemilu yang demokratis adalah adanya partisipasi politik. Keberadaan partispasi masyarakat dalam pemilu merupakan sesuatu yang krusial keberadaannya sebab pemilu akan melahirkan pemimpin yang kesuksesan Pilkada menjadi cerminan dari kualitas demokrasi. Oleh karena itu, partisipasi warga negara ketika memilih pemimpin harus ada meskipun keterlibatan warga negara lebih banyak berhenti pada proses pemilihan.

Lansia perlu mendapat perhatian khusus dalam pemilu, seharusnya tidak hanya dalam pemilu saja tetapi dalam segala aspek kehidupan, mengingat mereka patut dihormati dan sayangi karena lansia juga berhak mendapat kehidupan yang layak walaupun sudah tua. Sering kita ketahui , khususnya masyarakat lansia terutama pada saat kegiatan politik, beranggapan bahwa tidak ada perbedaan mereka memilih siapa untuk menjadi pemimpin daerah terhadap perubahan nasib mereka. Selanjutnya para lansia lebih senang berada dirumah menikmati dan menghabiskan waktunya di dalam rumah, dari pada ikut berpartisipasi menggunakan hak pilihnya.

Dalam kondisi lain sebagian besar lansia menggunakan kursi roda, tidak hanya itu ada juga lansia yang fungsi tubuhnya sudah menurun, sakit-sakitan sehingga tidak mudah untuk beraktivitas apalagi untuk pergi ke TPS untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum. Tentunya hal tersebut menjadi hambatan bagi mereka untuk berpergian, jangankan untuk berpergian, untuk melakukan aktivitas sehari-hari saja mereka kesusahan apalagi pergi ke TPS

untuk berpartisipasi dan menggunakan hak suaranya dalam pemilu, sehingga mereka membutuhkan orang lain, tidak hanya itu belum lagi lansia yang hidupnya terlantar di jalanan, walaupun begitu mereka tetap berhak untuk menggunakan hak pilihnya agar tidak banyak angka golongan putih (golput).

Berdasarkan hal tersebut, sudah menjadi tugas bagi pemerintah dan semua kalangan untuk bagaimana meningkatkan partisipasi lansia akan pentingnya pemilu. Diskriminasi masih sering terjadi terhadap kaum lansia, karena mereka dianggap sudah tidak berguna lagi bagi masyarakat bahkan dianggap menjadi beban, dan hak-hak politiknya pun masih sering dirampas. Padahal, seharusnya mereka memiliki hak yang sama sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia, dimana penduduk lanjut usia dapat berperan dalam kegiatan pembangunan nasional.

Partisipasi lansia dalam pemilu penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang inklusif. Lansia memiliki pengalaman hidup berharga dan perspektif unik, yang dapat memberikan kontribusi berarti dalam proses pengambilan keputusan politik. Meskipun demikian, partisipasi lansia dalam pemilihan umum dapat dipengaruhi beberapa faktor. Beberapa lansia mungkin menghadapi tantangan fisik atau mobilitas yang membatasi kemampuan mereka untuk mengunjungi tempat pemungutan suara. Dalam hal ini, penting untuk menyediakan fasilitas yang ramah lansia dan mempertimbangkan penyediaan fasilitas pemungutan suara yang mudah diakses.

Selain itu, lansia juga mungkin menghadapi tantangan informasi. Mungkin ada kesulitan dalam memahami platform komunikasi modern atau mengakses informasi terkini tentang calon dan isu-isu politik. Oleh karena itu, penting untuk memberikan akses yang mudah ke informasi yang relevan dan menyediakan pendidikan pemilih yang inklusif bagi lansia. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk meningkatkan partisipasi lansia adalah melibatkan organisasi masyarakat atau lembaga yang fokus pada lansia. Mereka dapat menyelenggarakan acara atau program pendidikan pemilih khusus untuk lansia, membantu mereka memahami proses pemilihan umum, calon yang ada, dan isu-isu yang relevan.

Selain itu, penting untuk memastikan bahwa pemilihan umum yang diadakan pada hari kerja atau hari libur dapat diakses oleh lansia yang mungkin memiliki keterbatasan waktu atau komitmen lainnya. Pemilihan yang diselenggarakan pada waktu yang nyaman dapat membantu meningkatkan partisipasi mereka. Adanya dukungan dan kolaborasi dari pemerintah, organisasi masyarakat, dan keluarga juga sangat penting. Melalui upaya bersama ini, dapat dibangun kesadaran tentang pentingnya partisipasi lansia dalam pemilihan umum dan mendorong mereka untuk ikut serta dalam proses demokratis.

Dalam keseluruhan, partisipasi lansia dalam pemilihan umum penting untuk menjaga keadilan, representasi yang beragam, dan keberlanjutan demokrasi. Diperlukan langkah-langkah konkret untuk memastikan aksesibilitas, inklusivitas, dan dukungan yang tepat bagi lansia agar mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses pemilihan umum.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Salah satu indikator suksesnya suatu penyelenggaraan pemilihan umum adalah partisipasi politik masyarakat yang diwujudkan dalam hal pemberian hak suara yang dimiliki oleh masyarakat yang telah memiliki hak pilih pada pemilihan umum tersebut. Partisipasi politik merupakan salah satu ciri khas dari modernisasi politik itu sendiri.pemerintah membuat dan melaksanakan keputusan politik yang akan menyangkut dan mempengaruhi kehidupan masyarakat, maka masyarakat mempunyai hak dalam keikutsertaan dalam penentuan isi keputusan politik yang dibuat pemerintah.

Lansia perlu mendapat perhatian khusus dalam pemilu, seharusnya tidak hanya dalam pemilu saja tetapi dalam segala aspek kehidupan, mengingat mereka patut dihormati dan sayangi karena lansia juga berhak mendapat kehidupan yang layak walaupun sudah tua.Dalam kondisi lain sebagian besar lansia menggunakan kursi roda, tidak hanya itu ada juga lansia yang fungsi tubuhnya sudah menurun, sakit-sakitan sehingga tidak mudah untuk beraktivitas apalagi untuk pergi ke TPS untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum. Tentunya hal tersebut menjadi hambatan bagi mereka untuk berpergian, jangankan untuk berpergian, untuk melakukan aktivitas sehari-hari saja mereka kesusahan apalagi pergi ke TPS untuk berpartisipasi dan menggunakan hak suaranya dalam pemilu, sehingga mereka membutuhkan orang lain, tidak hanya itu belum lagi lansia yang hidupnya terlantar di jalanan, walaupun begitu mereka tetap berhak untuk menggunakan hak pilihnya agar tidak banyak angka golongan putih (golput).Lansia memiliki pengalaman hidup yang berharga dan perspektif yang unik, yang dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam proses pengambilan keputusan politik. Oleh karena itu, penting untuk memberikan akses yang mudah ke informasi yang relevan dan menyediakan pendidikan pemilih yang inklusif bagi lansia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih saya ucapkan kepada pihak yang sudah banyak membantu dalam pembuatan jurnal ini terutama Dosen Sosiologi, serta temanteman saya. Karena tanpa bantuan mereka jurnal ini tidak akan selesai dengan cepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arniti, N. K. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(2), 329-348.
- Dimas, A. (2023). Strategi Komisi Pemilihan Umum Meningkatkan Partisipasi Pemilih Lansia (Studi Pemilu Kabupaten Pringsewu 2024).
- Maramis. (2018). Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa. Surabaya: Airlangga University Press.
- Wahyuni, D. (2022). Partisipasi Politik Masyarakat Pemilih Lansia di Masa Pandemi Covid-19 dalam Pilkada Serentak 2020 di Kabupaten Sukoharjo.
- Yolanda, C. (2022). Partisipasi Pemilih Lanjut Usia pada Pemilihan Gubernur di Provinsi Jambi (Doctoral dissertation, Universitas Jambi).